



Upah Dinilai Lumayan Tinggi

■ Pemkot Yogya Segera Sosialisasi UMK 2019

YOGYA, TRIBUN - Besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2019 untuk Kota Yogyakarta disepakati Rp1.846.400. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta, Agus Tri Hariadi mengapresiasi besaran UMK yang ditetapkan tersebut.

Menurutnya, hal tersebut telah sesuai dengan rumusan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. "Itu sudah sesuai. Survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) masih di bawah itu. Penetapan ini sudah lumayan tinggi," bebernya, Selasa (30/10).

Ia menjelaskan, dengan penetapan UMK 2019 tersebut, pihaknya beserta buruh yang lain bisa menerima. Walau demikian ia meminta agar pada 2020 penetapan UMK harus disesuaikan alias bertambah dibanding 2019 ini.

"Masalah KHL rendah ini kan karena komponen (perhitungan) dari (pemerintah) pusat. Kalau perhitungan KHL nanti lebih tinggi, harapannya bisa disesuaikan," tuturnya, Selasa (30/10).

Terkait hasil perhitungan yang dilakukan asosiasi buruh lain yang



Setelah SK Gubernur (DIY) turun, akan kami sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan

Lucy Irawati
Kepala DinasKerata Kota Yogya

mencapai Rp2 juta lebih, pihaknya mengaku tidak mengetahui dasar penghitungan mereka. "Kami sesuai dengan pemerintah. Kalau yang lain di atas Rp2 juta, kami enggak tahu," ucapnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apirndoi) Yogyakarta, Ibnu Saleh, eringan berkomentar banyak banyak terkait penetapan besaran UMK 2019 untuk Kota Yogyakarta. "Saya tahu itu sudah disetujui. Tapi kami mungga SK (surat keputusan) turun. Kalau berkomentar sekarang saya rasa kurang etis," pungkasnya.

● ke halaman 15

Tentang Upah

- UMP/UMK 2019 DIY sudah disepakati dan akan ditetapkan pada awal November mendatang 2019
- Perbedaan penyikapan mengenai hal ini selalu menjadi diskursus dari tahun ke tahun.
- Ada pihak yang menganggap upah sudah sesuai, ada pula yang menilai upah masih cukup rendah.
- Paslirnya, komponen perhitungan kebutuhan hidup layak di DIY tahun depan untuk penetapan 2020 akan memasukkan unsur non-pangan. 2020
- UMP tertinggi tahun 2019 ada di Kota Yogyakarta dengan Rp1.846.400.
- Sedangkan UMP terendah ada di Kabupaten Gunungkidul dengan Rp1.571.000.

Instansi	Nilai Berita
1. Din, UMKM naker trans	<input type="checkbox"/> Negatif
2. _____	<input type="checkbox"/>
3. _____	<input type="checkbox"/>
4. _____	<input type="checkbox"/>
5. _____	<input type="checkbox"/>

- Netral
- Biasa
- ✓ diketahui



Upah Dinilai Lumayan

● Sambungan Hal 9

Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Lucy Irawati menjelaskan, tindak lanjut dari penetapan UMK 2019 adalah dengan menggelar koordinasi oleh Dinas Ketenagakerjaan DIY terkait catatan yang diberikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Setelah SK Gubernur (DIY) turun, akan kami sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menjelaskan, KHL sempat menjadi pemikiran. KHL sendiri terbagi menjadi KHL makanan dan KHL non-makanan. Terkait KHL makanan, Haryadi menuturkan bahwa memang untuk harga makanan di Kota Yogyakarta termasuk murah. "Yang bisa di-upgrade komponen KHL non-makanan. Kalau UMR sudah ada

rumusnya," jelasnya.

Ia menuturkan bahwa untuk melakukan *upgrade* KHL, tidak bisa dilakukan Pemkot Yogyakarta sendiri, tapi harus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik. "Itu untuk referensi KHL tahun mendatang. Dan angka yang direkomendasikan merupakan rekomendasi dewan pengupahan," ujarnya.

Upah murah

Terpisah, Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta, Kirnadi, menyatakan kekecewaannya terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP) DIY 2019 yang rendah, yakni Rp1.570.922.73. Padahal pihaknya sudah sudah menawarkan adanya upah sektoral untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di DIY, tapi menurutnya, tidak diperhatikan.

Dia menambahkan, kenaikan UMK 2019 dibanding tahun ini tetap tak berdampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup para buruh. Karena kenaikannya sesuai SE Kemakertrans, yaitu 8,03%. "Dengan kenaikan 8,03% tidak

bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan keluarga. Dengan upah Rp1,8 juta dengan dua anak sekolah pasti pusing," katanya, kemarin.

Ia memaparkan, menurut survei KHL dari ABY, ntuk Kota Yogyakarta Rp2,9 juta, Kabupaten Sleman sekitar Rp2,8 juta, Kabupaten Bantul sekitar Rp2,7 juta, Kabupaten Kulon Progo sekitar Rp2,5 juta, dan Kabupaten Gunungkidul sekitar Rp2,4 juta.

Kesepakatan upah 2019, UMP DIY disepakati sebesar Rp1.570.922.73. UMK

Kota Yogyakarta Rp1.846.400, Kabupaten Sleman Rp1.701.000, Kabupaten Bantul Rp1.649.800. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo Rp1.613.200.00, dan Kabupaten Gunungkidul Rp1.571.000. "DIY tetap akan menjadi lahan upah murah. Karena tidak ada kemauan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh," katanya.

Kirnadi merisaukan masa depan pengupahan di DIY. Kue keuntungan dari bisnis di DIY hanya dinik-

mati oleh sebagian kecil orang. Hal ini, menurutnya, yang membuat kedalaman kemiskinan di DIY semakin mengkhawatirkan. Terlihat dari indeks *gini ratio* yang semakin lebar.

"Karena tidak masuk akal upah di Sleman kalah dengan Magelang dan Klaten. Coba bandingkan dua kabupaten tersebut dari segi investasi, pad (pendapatan asli daerah), sdm (sumber daya manusia), dan lain-lain. UMK di Klaten Rp1.661.632,35 tahun 2018, Kabupaten Magelang 1.742.000. Itu semua ditambah 8,03% untuk tahun 2019, dipastikan akan lebih tinggi dari UMK Sleman saat ini," urainya.

Menurut Kirnadi, salah satu cara penanggulangan kemiskinan adalah adanya intervensi dari pemerintah. Upah adalah intervensi yang utama, dibandingkan dengan program bantuan-bantuan yang tidak semua sesuai dengan peruntukannya. "Padahal gubenur punya kewenangan untuk menaikkan upah," pungkasnya. (kur/maw)

Kenaikan Belum Signifikan

PENELITI Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan dan Pengamat perburuhan UGM, DR Hemptri Suyatna menyatakan, kenaikan UMK di Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 dirasa belum signifikan. "Kalau di Kota Yogyakarta, ya, paling nggak Rp2 juta. Kota dan Kabupaten Sleman itu hampir mirip, ya. Kalau kabupaten lain masih bisa segitu, tetapi kalau Kota Yogyakarta setidaknya Rp2 juta," katanya, kemarin.

Hemptri memaparkan, angka yang ditetapkan untuk UMK Kota Yogyakarta masih belum sesuai dengan kebutuhan layak minimum. Ia berharap dengan pengupahan yang lebih layak, juga bisa menekan angka kemiskinan.

"Kebutuhan di Yogyakarta kan semakin meningkat, makan saja paling tidak Rp30 ribu, nanti belum untuk uang kos Rp600 ribu, belum operasional (membeli) bensin, belum lagi untuk sandang. Kalau (upah) Rp1,8 juta masih belum ada simpanan," jelasnya.

Ia pun meminta pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan. Kemudahan tersebut bisa berupa perizinan, atau proses produksi. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan ekonomi perusahaan tetap eksis meskipun upah naik.

● ke halaman 15

Kenaikan Belum Signifikan

● Sambungan Hal 9

Sementara itu, pengamat hukum perburuhan dari Universitas Atma Jaya, Hari Supri menyatakan, penghitungan KHL menggunakan variabel non-pangan adalah sebuah kemajuan. Meski besarnya nanti masih jauh dari harapan, tapi dia menganggap hal tersebut sinyal bagus dari pemerintah.

"Kita nilai saja persentase kenaikan upah tahun 2020. Logikanya jika melihat unsur penghitungan tidak hanya pakai pangan saja, mestinya kenaikan (upah) dari 2018

ke 2019 dan 2019 ke 2020 perbandingan persentasenya agak jauh. Kita lihat aja janji itu terpenuhi tidak besaran persentasenya," ucapnya.

Persempit kesenjangan

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menjelaskan, kebijakan penetapan upah minimum merupakan kebijakan intervensi pemerintah untuk menjaga kelompok masyarakat pekerja agar mendapat kehidupan yang layak. "Penetapan tersebut juga bertujuan untuk mempersempit kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Yogyakarta," jelasnya. Sela-sela (30/10).

Ia menambahkan, penentuan upah minimum paling ti-

dad melibatkan empat komponen, yakni pemerintah daerah, dewan pengupahan, serikat pekerja, dan serikat pengusaha. "Namun sebelum melakukan penetapan upah minimum, didahului dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL)," tandasnya.

Terkait penetapan UMP dan UMK di DIY untuk tahun 2019, Nasrul menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang perlu dicermati. "Apakah penetapan upah minimum sudah sesuai dengan hasil survei KHL? Lalu apakah sudah memasukkan skenario perubahan kondisi ekonomi tahun 2019?" ujarnya.

Kompromi

Ia menambahkan, pene-

tapan upah minimum menjadi titik kompromi dan sudah pasti tidak bisa memuaskan semua pihak, yakni pengusaha ataupun pekerja.

"Untuk itu pemerintah juga harus menyiapkan skema bantuan di luar penentuan upah minimum untuk mengurangi beban, baik bagi pengusaha maupun pekerja," ujarnya.

Ia menuturkan, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pengusaha dapat berupa mempermudah izin investasi serta insentif pajak. Sementara bagi pekerja dapat berupa subsidi pendidikan, jaminan kesehatan, dan angkutan publik yang murah. (maw/kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005